

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas teori, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Tingkat Pengangguran Terbuka, sebagai landasan yang kuat pada penelitian ini.

#### **2.1 Kerangka Teori**

Bagian ini dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori ini akan menjadi dasar untuk memahami variabel-variabel yang diteliti.

##### **2.1.1 Ketimpangan Pendapatan**

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi yang mengacu pada disparitas distribusi pendapatan di antara individu atau kelompok dalam suatu wilayah. Ketimpangan pendapatan dapat terjadi di antara individu, kelompok Masyarakat, atau wilayah yang berbeda. Konsep mengenai ketimpangan ini, berkaitan dengan masalah keadilan. Kerangka utama untuk memahami keadilan adalah pandangan bahwa keadilan serta kesetaraan pendapatan sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis. *World Development Report* (2006) menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan tidak hanya berkaitan dengan perbedaan dalam pendapatan, tetapi juga mencakup perbedaan dalam kesempatan ekonomi dan politik antar kelompok masyarakat.

Simon Kuznets (1955) memperkenalkan konsep *Kurva Kuznets* yang menjelaskan hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

Dia berpendapat bahwa pada tahap awal dari pembangunan ekonomi, ketidaksetaraan pendapatan cenderung meningkat bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah mencapai titik tertentu, ketidaksetaraan akan mulai berkurang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Kurva ini membentuk pola seperti huruf U terbalik. Teori ini didasarkan pada transformasi struktural dari ekonomi agraris tradisional menuju ekonomi industri modern. Pada fase awal industrialisasi, perbedaan pendapatan semakin besar karena hanya sebagian kecil masyarakat yang bisa mengambil peluang di sektor industri. Namun, seiring dengan bertambahnya migrasi tenaga kerja ke sektor industri yang menawarkan produktivitas dan gaji lebih tinggi, ketidaksetaraan pendapatan umumnya akan berkurang.

Gini Rasio merupakan indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Gini Rasio adalah salah satu alat ukur yang paling banyak digunakan untuk melihat seberapa timpang distribusi pendapatan di suatu negara atau wilayah. Indeks ini pertama kali diperkenalkan oleh Corrado Gini, seorang ahli statistik asal Italia. Nilainya berada di antara 0 hingga 1, yang masing-masing merepresentasikan tingkat ketimpangan pendapatan. Jika nilainya 0, itu berarti terjadi kesetaraan pendapatan secara sempurna atau dalam artian setiap orang dalam masyarakat memiliki jumlah pendapatan yang sama. Sebaliknya, jika nilainya 1, itu menunjukkan ketimpangan total, di mana seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu orang saja, sementara yang lainnya tidak memiliki pendapatan sama sekali. Semakin tinggi nilai Koefisien Gini mendekati angka 1, berarti

ketimpangan pendapatan semakin parah. Sebaliknya, makin dekat ke angka 0, maka distribusi pendapatan di masyarakat tersebut cenderung lebih merata.

### **2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai seberapa berhasil sebuah negara dalam memperbaiki kualitas hidup warganya. IPM digunakan untuk menentukan kategori sebuah negara, apakah termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara kurang berkembang, serta untuk menilai dampak kebijakan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat (UNDP, 2019). Indeks ini tidak hanya memfokuskan pada seberapa kaya suatu negara, tetapi juga memperhatikan elemen-elemen yang mendasar dalam kehidupan manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi masyarakat.

IPM dirancang oleh ekonom dari Pakistan, Mahbub ul Haq, dengan dukungan Gustav Ranis dari Universitas Yale dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics, serta diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sejak tahun 1990. Berdasarkan informasi dari UNDP (2019), IPM mengevaluasi perkembangan manusia dengan menilai beberapa aspek dasar dari kualitas hidup, yang terdiri dari:

- Kesehatan (diukur melalui angka harapan hidup pada saat lahir). Indikator ini menggambarkan rata-rata usia yang kemungkinan besar akan dicapai oleh seseorang sejak ia dilahirkan, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan masyarakat tetap seperti saat ini. Semakin tinggi angka harapan hidup, itu berarti masyarakat hidup dalam kondisi kesehatan yang baik, memiliki pola

hidup sehat, dan mendapat akses yang memadai terhadap layanan medis dan fasilitas kesehatan lainnya.

- Pendidikan. Komponen pendidikan ini mencerminkan seberapa baik masyarakat dapat mengakses pendidikan dan sejauh mana kualitasnya. Tingginya angka melek huruf dan banyaknya orang yang mengikuti pendidikan formal menunjukkan bahwa negara tersebut berhasil membangun sumber daya manusia yang terampil, berpikir kritis, dan siap menghadapi tantangan global.
- Standar hidup (diukur dengan GDP per kapita dalam paritas daya beli). Indikator ini memperlihatkan berapa besar rata-rata pendapatan yang bisa dinikmati oleh setiap warga negara, setelah disesuaikan dengan tingkat harga dan biaya hidup di negaranya. Artinya, bukan hanya soal berapa besar uang yang dimiliki, tapi seberapa banyak kebutuhan hidup yang bisa dipenuhi dengan uang tersebut. Semakin tinggi nilainya, makin layak pula kehidupan yang bisa dijalani oleh masyarakat.

### **2.1.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merujuk pada teknologi yang memberikan akses informasi melalui telekomunikasi. Menurut Katz dan Koutroumpis (2013), akses dan pemanfaatan TIK dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatkan peluang kerja, sehingga berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pendapatan. Saat ini, TIK telah menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Menurut World Bank (2020), pemanfaatan TIK memberikan banyak manfaat, antara lain:

- Meningkatkan produktivitas. TIK memberikan kesempatan bagi pelaku bisnis, baik yang kecil maupun yang besar, untuk mengadopsi cara-cara kerja yang lebih cepat, murah, dan efisien. Contohnya termasuk otomatisasi di sektor produksi, hingga penggunaan perangkat lunak untuk akuntansi.
- Menciptakan lapangan kerja baru. Perubahan digital menciptakan banyak peluang pekerjaan di bidang teknologi, seperti pengembang aplikasi, analis data, spesialis keamanan siber, dan pemasaran digital. Selain itu, kemunculan ekonomi kreator dan e-commerce juga berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja.
- Memperluas akses ke pasar dan layanan. Dengan dukungan TIK, pelaku bisnis kini dapat menjangkau konsumen di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau secara fisik. Masyarakat di lokasi terpencil kini juga dapat mengakses layanan seperti perbankan, pendidikan, dan kesehatan melalui internet.

TIK bukan sekadar alat komunikasi, tapi kini sudah menjadi bagian penting dari pembangunan nasional. Ia menciptakan peluang, mempercepat inovasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk tidak hanya menyediakan infrastruktur TIK, tapi juga memastikan masyarakat bisa mengakses dan memanfaatkannya secara optimal.

#### **2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan sebuah indikator yang menunjukkan persentase orang yang tidak memiliki pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja di suatu daerah. Dengan kata lain, ini menggambarkan

proporsi masyarakat yang siap dan mau bekerja, tetapi masih belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menunjukkan adanya masalah dalam distribusi pekerjaan, rendahnya permintaan tenaga kerja, atau kekurangan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri.

Menurut teori ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith (1776) dan David Ricardo (1817), pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan sementara di pasar tenaga kerja. Dalam pandangan ini, pasar dianggap memiliki mekanisme yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri secara otomatis tanpa perlu intervensi pemerintah. Ketika terjadi kelebihan tenaga kerja atau pengangguran, maka upah tenaga kerja akan cenderung turun. Penurunan upah ini akan mendorong perusahaan untuk merekrut lebih banyak pekerja, sehingga pengangguran secara perlahan akan berkurang. Dengan demikian, teori klasik menganggap bahwa pengangguran bukanlah masalah jangka panjang, karena pasar tenaga kerja akan selalu menyesuaikan diri hingga tercapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), yang termasuk dalam kategori pengangguran terbuka adalah sebagai berikut:

- Orang yang belum memiliki pekerjaan dan aktif mencari lowongan kerja
- Mereka yang sedang mempersiapkan usaha tetapi belum memulainya
- Orang yang tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (karena minimnya lowongan)
- Orang yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai referensi penulisan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ardiani & Prabowo (2024) yang berjudul “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan”. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2018-2022. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel independen terdiri dari 3 yaitu kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian dengan variabel yang sama dengan hasil berbeda dilakukan oleh Ivanovi Sulistyaningrum et al. (2022) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020”. Penelitian ini menggunakan data panel enam provinsi yang ada di Pulau Jawa. Variabel independen terdiri dari 3 yaitu, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan upah minimum provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Rahmadi et al. 2024) yang berjudul “Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Sumatera”. Penelitian

ini menggunakan data sekunder dari 10 Provinsi di Sumatera dalam tahun 2018-2022. Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari PDRB, populasi, inflasi, indeks pembangunan manusia serta teknologi informasi dan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh negative terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yoertiara & Feriyanto (2022) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa”. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 6 Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2012-2021. Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Namun penelitian lain memberikan hasil yang berbeda. Penelitian yang telah dilakukan oleh Farhan & Sugianto (2022) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa” Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 6 Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2014-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.